

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Peneliti

Dalam membangun negara yang makmur dan sejahtera, inisiatif pembangunan harus dilakukan untuk memastikan bahwa hasilnya bermanfaat bagi semua individu dan semua golongan dan dapat mendorong kesejahteraan yang memadai. Kesejahteraan yang dituju adalah memiliki kehidupan yang layak, sehat serta memiliki kemampuan untuk produktif. Dalam hal pemerataan Pembangunan keberhasilan dari suatu pemerintahan dapat diukur melalui seberapa besar pemerintah mampu menciptakan dan memperluas jumlah kesempatan kerja serta menurunkan jumlah pengangguran (Mulyaputri & Kartika, 2021).

Upaya Pembangunan yang direncanakan berawal dari proses untuk meningkatkan yang berfokus pada penguatan dan kemajuan ekonomi dalam aspek kehidupan. (Adawi & Azhari, 2022). Akan tetapi untuk mencapai Pembangunan ekonomi terdapat permasalahan klasik yang tak kunjung usai. Menciptakan kesempatan kerja bagi angkatan kerja yang terus bertambah merupakan masalah yang signifikan bagi pembangunan.

Sukirno (2006) dalam Fatihudin (2019:7) berpendapat bahwa Pembangunan ekonomi merupakan pertumbuhan ekonomi disertai dengan adanya transformasi. Artinya Perkembangan ekonomi suatu negara tidak hanya dinilai dari pertumbuhan barang dan jasa penting dari waktu ke waktu, tetapi juga dari berbagai indikator aktivitas ekonomi, termasuk kemajuan teknologi, tingkat pendidikan yang lebih tinggi, infrastruktur yang lebih baik, serta pendapatan dan kemakmuran penduduk. Menurut Todaro dalam Fatihudin (2019:7) kemajuan ekonomi suatu negara bertumpu pada tiga pilar fundamental yaitu peningkatan sumber daya modal, peningkatan jumlah penduduk dan kemajuan teknologi. Pengembangan sumber daya modal terjadi jika sebagai dari pendapatan diinvestasikan kembali yang bertujuan memperoleh pendapatan dan memperluas output.

Peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan perluasan pasar dalam negeri. Fenomena ini memiliki konsekuensi baik menguntungkan maupun merugikan terhadap upaya Pembangunan ekonomi. Hal ini bergantung pada kapasitas sistem ekonomi untuk mengakomodasi dan memanfaatkan secara efektif pertambahan angkatan kerja yang dihasilkan. Namun, penduduk berfungsi sebagai sumber tenaga kerja yang dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi, meskipun fungsinya pasif dalam perekonomian.

Di negara-negara berkembang, tantangan ekonomi telah bergeser. Saat ini, masalah utama bukan lagi sekadar kurangnya lapangan kerja atau rendahnya produktivitas. Persoalan yang dihadapi kini lebih kompleks dan beragam. Salah satu isu krusial adalah lonjakan tingkat pengangguran yang berasal dari kurangnya permintaan tenaga kerja di pasar. Sumarsono menjelaskan (2003) dalam Trisila (2023:65) Permintaan tenaga kerja merupakan sejumlah pekerja yang diinginkan oleh pemberi kerja atau suatu instansi. Sejumlah pekerja yang diminta mempunyai hubungan yang negatif dengan tingkat upah.

Menurut Badan Pusat Statistik data pada angkatan kerja di Indonesia berjumlah 147,71 juta orang. Hal tersebut mengalami kenaikan 3,99 juta orang pada agustus 2022. Permintaan dan penawaran tenaga kerja yang tidak seimbang adalah konsekuensi dari kelebihan tenaga kerja. Keadaan ini dapat memberikan dampak yang menguntungkan dan merugikan bagi situasi suatu negara. Apabila jumlah individu atau masyarakat yang banyak dapat dikendalikan dengan efektif maka dapat mendorong pertumbuhan dan kemajuan perekonomian. Sementara itu, meningkatnya jumlah usia yang bekerja menjadi persoalan yang sulit diatasi oleh pemerintah karena terbatasnya dalam menyediakan kesempatan untuk bekerja dan persaingan yang cukup ketat sehingga tenaga kerja tidak terserap dengan sepenuhnya mengakibatkan pengangguran.

Pembangunan ketenagakerjaan ditujukan untuk meningkatkan, pengembangan dan membina tenaga kerja yang berkualitas dan produktif.

Menurut Sukirno (1981) tahap Pembangunan ekonomi terbagi dalam tiga fase. Fase awal, Pekerja setengah menganggur beralih dari pertanian ke industri, dengan upah yang setara. Fase menengah, buruh tani yang upahnya di bawah standar beralih ke sektor industri. Fase lanjutan, produktivitas pertanian meningkat, dengan pekerja menghasilkan output yang melebihi tingkat upah standar. Dengan demikian kelebihan tenaga kerja yang meningkat terus menerus akan terserap di sektor industri dan jasa sejalan dengan bertambahnya nilai output.

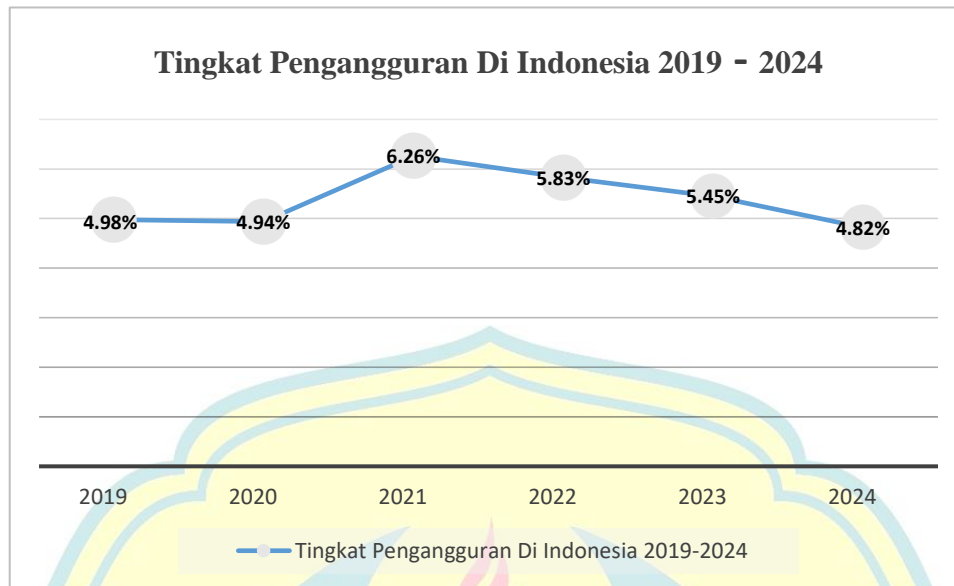
Indonesia sebagai negara berkembang dengan penduduk cukup besar mempunyai permasalahan yang harus diatasi yakni pengangguran structural yang relatif besar. Pengangguran structural muncul dari ketidaksesuaian antara jumlah pekerjaan yang dapat diciptakan ekonomi dan ukuran tenaga kerja yang tersedia. Kondisi ini terjadi ketika karakteristik dan keterampilan lain dari orang yang sedang mencari pekerjaan tidak sesuai dengan persyaratan pekerjaan yang tersedia. Perubahan teknologi dan pergeseran structural dalam perekonomian menjadi penyebab perubahan komposisi keterampilan yang dibutuhkan dalam pekerjaan (Suparman, 2022)

Menurut ILO, dalam buku Pembangunan Ketenagakerjaan, seseorang diklasifikasikan sebagai pengangguran jika mereka tidak melakukan pekerjaan selama lebih dari satu jam dalam periode tertentu dan secara aktif mencari pekerjaan. Pengangguran menjadi salah satu untuk mengukur indikator ekonomi yang mudah untuk dilihat karena tingkat pengangguran akan meningkat dengan cepat selama resesi dan kembali turun seiring dengan adanya pemulihan ekonomi (Suparman, 2022). Masalah pengangguran tidak hanya berdampak pada orang-orang yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga pada mereka yang belum pernah memiliki pekerjaan, termasuk para lulusan baru yang sedang mencari pekerjaan (Winarni, 2022).

Menurut Sukirno (2006) Ketidakseimbangan antara terbatasnya kesempatan kerja dan melimpahnya pasokan tenaga kerja menyebabkan

pengangguran. Proporsi pencari kerja yang tidak dapat menemukan pekerjaannya diukur melalui indikator tingkat pengangguran terbuka. Terlihat jelas pada masa Covid-19 bahwa Indonesia mengalami penurunan pendapatan, pelemahan dan perlambatan pertumbuhan ekonomi karena kebijakan pemerintah memberlakukan ‘Pembatasan Sosial Berskala Besar’ (PSBB) di mayoritas wilayah Indonesia. Akibatnya, Pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat tersendat yang membuat kegiatan masyarakat terutama bidang ekonomi menjadi limit sehingga lapangan kerja yang baru juga terbatas. Menurut laporan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) yang dirilis 1 Mei 2020, lebih dari 1,7 juta pekerja yang terkena dampak di sektor formal dan informal. Akibat pandemi Covid-19, 1.032.960 pekerja sektor formal dirumahkan, sementara 375.165 pekerja sektor formal lainnya diberhentikan. Selain itu, 314.833 pekerja di sektor informal terdampak pandemi. Angka-angka ini menggambarkan besarnya guncangan yang dialami pasar tenaga kerja Indonesia akibat krisis kesehatan global. Baik pekerja formal maupun informal menghadapi tantangan berat, baik berupa pemberhentian sementara, PHK, atau dampak negatif lainnya pada mata pencaharian mereka.

Data BPS menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka yang ditunjukkan pada grafik di bawah ini bersifat fluktuatif. Pada tahun 2021 meningkat 1,32% poin dibandingkan dengan Februari 2020. Hal ini berdampak pada oleh lesunya perekonomian di Indonesia akibat pandemi Covid-19 yang dimulai Maret 2020. Setelah Covid-19 mereda tingkat pengangguran mengalami penurunan kembali. Pada Februari 2022 sebesar 5,83%. Hal ini berarti enam dari 100 orang Angkatan kerja adalah pengangguran. Pada Februari 2022, tingkat pengangguran terbuka turun sekitar 0,43% dibandingkan Februari 2021. Pada 2024 juga terjadi penurunan sebesar 0,63% dibandingkan tahun 2023.



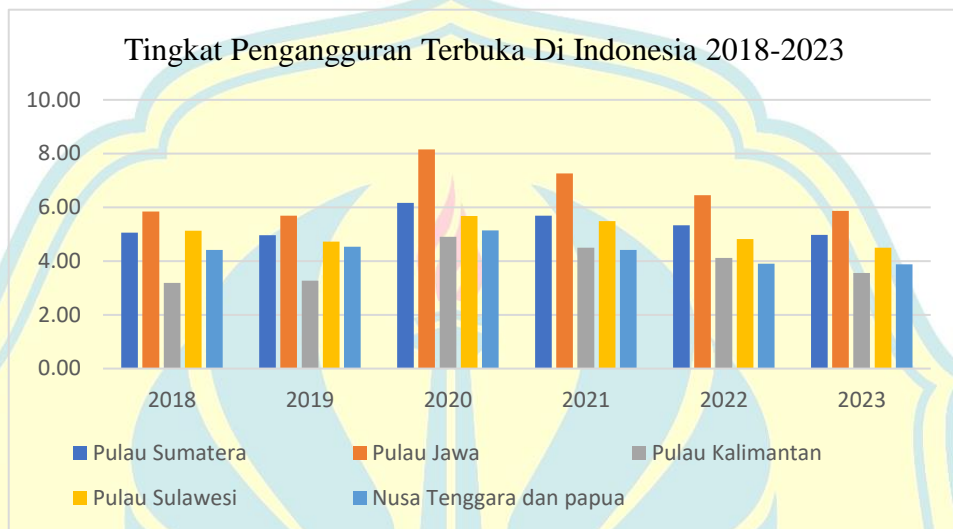
Gambar 1. 1 Tingkat Pengangguran di Indonesia 2019 - 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Pekerja dan bukan pekerja adalah dua kategori utama yang biasanya dibagi ke dalam populasi suatu negara. Angkatan kerja terdiri dari individu yang telah mencapai usia kerja dan mampu berpartisipasi dalam kegiatan produktif yang menghasilkan suatu produk baik dalam bentuk barang maupun layanan. Batas minimum usia kerja di Indonesia adalah 15 tahun. Angkatan kerja dan bukan angkatan kerja adalah dua kategori angkatan kerja yang berbeda yang masuk ke dalam tenaga kerja. Menurut Dumairy (1996) Orang-orang yang bekerja atau secara aktif mencari pekerjaan meskipun untuk sementara waktu menganggur merupakan bagian dari angkatan kerja. Sebaliknya Individu yang menganggur dalam usia kerja atau pelamar diklasifikasikan sebagai berada di luar pasar tenaga kerja (Daengs, 2020).

Data sensus tahun 2020 menunjukkan bahwa Pulau Jawa masih menjadi tempat tinggal mayoritas penduduk Indonesia, dengan 151 juta penduduk (56,10% dari total penduduk negara ini). Meskipun menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, Pulau Jawa masih menjadi tempat tinggal lebih dari separuh penduduk Indonesia. Pada tahun 2022 total penduduk terbanyak ada di pulau jawa dengan rincian Provinsi

Jawa Barat berada di posisi pertama sebanyak 49,41 juta jiwa, posisi kedua Jawa timur dengan jumlah 41,15 juta dan Jawa Tengah menempati posisi ketiga jumlahnya sebanyak 37,03 juta penduduk. Sementara provinsi Banten urutan kelima dengan jumlah 12,25 juta jiwa. Provinsi DKI Jakarta urutan keenam sebanyak 10,68 juta jiwa dan Provinsi DI Yogyakarta menempati posisi keduapuluh jumlahnya sebanyak 3,76 juta jiwa.



Gambar 1. 2 Tingkat Pengangguran Terbuka Di Indonesia 2018 - 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Bersumber pada data di atas tingkat pengangguran Pulau-pulau utama di Indonesia meliputi Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua bersifat fluktuatif. Pada tahun 2020, terjadi peningkatan pengangguran yang signifikan hampir di semua provinsi di Indonesia akibat pandemi Covid-19. Namun, pada tahun 2021-2023 secara perlahan-lahan menunjukkan tren yang negatif. Pulau Jawa dari tahun ke tahun menjadi yang tertinggi diantara pulau-pulau yang lainnya.

Kesempatan kerja dan rekrutmen belum optimal, terbukti dengan tingginya tingkat pengangguran dan jumlah penduduk yang cukup besar di Pulau Jawa. Kondisi ini perlu dikaji dari aspek-aspek yang memengaruhi terserapnya tenaga kerja di Pulau Jawa sebagai Upaya untuk penciptaan kebijakan yang mendorong terbuka lebarnya lapangan kerja.

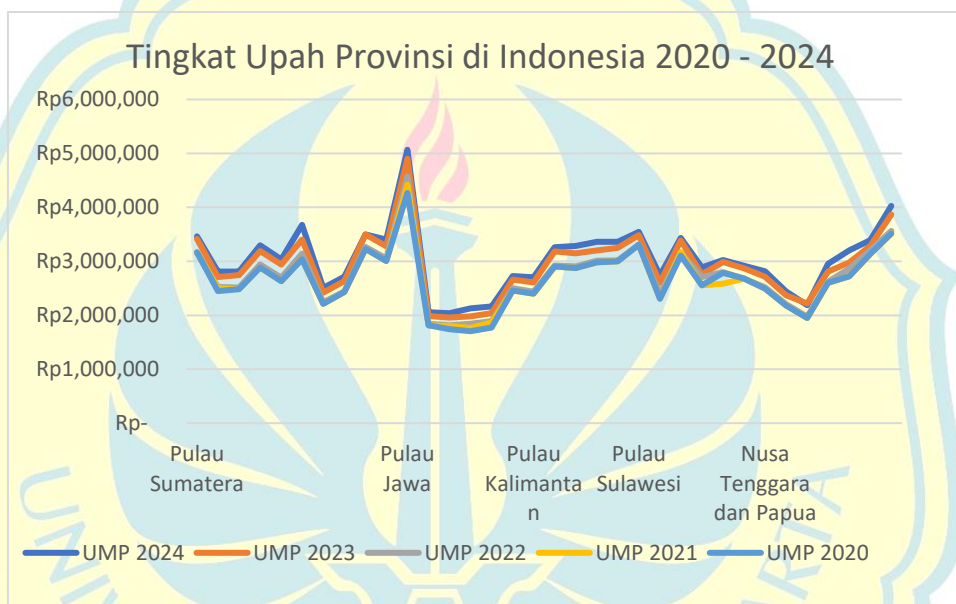
Ketersediannya lapangan pekerjaan atau permintaan tenaga kerja salah satunya dipengaruhi oleh pemberian gaji kepada pekerja. Menurut teori yang dikemukakan oleh Sudarsono permintaan tenaga kerja berfluktuasi sebagai respons terhadap perubahan upah dan berbagai faktor lainnya. Biaya produksi secara langsung dipengaruhi oleh tingkat upah. Ketika upah meningkat, pengusaha cenderung mengurangi tenaga kerja mereka untuk meminimalkan biaya. Upah merupakan kompensasi yang diperoleh atas upaya produktif tenaga kerja sebagai bentuk imbalan. Oleh karena itu pemerintah turut andil mengawasi pengusaha melalui undang-undang upah minimum untuk melindungi hak-hak pekerja dari pengurangan tenaga kerja yang bertujuan untuk mengurangi biaya produksi. (Eka et al., 2012).

Selama akhir tahun 1980-an Kebijakan Upah minimum menjadi komponen penting dari strategi pasar tenaga kerja Indonesia. Sejak tahun 2001 kewenangan penetapan tingkat upah minimum tidak lagi atur oleh pemerintah pusat melainkan dipindahkan kepada tingkat provinsi dan kota/kabupaten. Hal ini bertujuan agar pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi kerja regional dan dapat mengurangi risiko yang terkait dengan negosiasi dengan serikat pekerja di daerah masing-masing. (Malik, 2018).

Dalam penelitian latri wihastuti (2010) mengenai upah minimum provinsi (ump) dan penyerapan tenaga kerja di pulau jawa menemukan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dengan kenaikan upah minimum 1% akan menurunkan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.101%. Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi sebesar 1% akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 0.76%. lebih lanjut penelitian oleh febryana (2016) menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan bahwa meningkatnya 1% upah minimum provinsi menyebabkan turunnya penyerapan tenaga kerja sebanyak 0,12% dengan catatan ceteris paribus. Berdasarkan data dibawah ini, jika dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia, tingkat upah minimum provinsi di pulau Jawa secara

konsisten berada di bawah rata-rata nasional meskipun terdapat beberapa daerah menjadi upah minimum tertinggi.

Dalam pelaksanaannya upah minimum cukup bervariasi disetiap provinsi. Upah minimum ditentukan oleh pemerintah provinsi untuk wilayah masing-masing. Sementara, tingkat kota/kabupaten memiliki wewenang untuk menetapkan atau menerapkan upah minimum yang lebih tinggi dari upah minimum provinsi, tetapi tidak boleh lebih rendah dari upah minimum provinsi (Malik, 2018).



Gambar 1. 3 Tingkat Upah Provinsi di Indonesia 2020 - 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Pada tahun 2020 hingga 2023 wabah Covid-19 terjadi yang berdampak negatif pada tingkat upah pekerja di berbagai sektor. Penurunan upah ini terutama di tahun 2020 disebabkan oleh beberapa faktor yang merupakan konsekuensi dari pandemi Covid-19, mencakup perubahan jam kerja dan kebijakan perusahaan mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan upah yang berkurang, di samping berbagai aturan lain yang diadopsi oleh perusahaan. Dampak penurunan upah ini bervariasi antar sektor industri. Sektor yang paling terdampak adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan penurunan rata-rata sebesar 17,28%.

kemudian sektor Real Estat dengan penurunan 15,70%, sementara sektor Transportasi dan Pergudangan mengalami penurunan sebanyak 12,13%. Pada sektor manufaktur sektor padat karya juga terdampak dengan penurunan upah sebesar 7,13%. Variasi penurunan upah ini mencerminkan bagaimana pandemi memengaruhi sektor-sektor ekonomi secara berbeda, dengan industri yang bergantung pada mobilitas dan interaksi langsung mengalami dampak paling berat.

Faktor berikutnya adalah Investasi dalam negeri. investasi mempunyai andil dalam pertumbuhan dan perkembangan perekonomian. Sebagaimana yang dikatakan oleh Harrod-Domar menyatakan bahwa Modal adalah komponen penting dalam perekonomian suatu negara yang sedang berkembang, karena berfungsi sebagai sumber pembiayaan ekonomi produktif yang mendukung produksi produk dan jasa, sehingga meningkatkan permintaan agregat di masyarakat. Peningkatan investasi menghasilkan peningkatan stok modal. Dalam skenario ini, investasi modal diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai output produk dan layanan yang penting bagi perekonomian, sehingga memperluas bisnis atau industri dan menciptakan peluang kerja (Anggaran et al., 2017).



Gambar 1. 4 Realisasi Investasi Dalam Negeri Di Indonesia 2018-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Data diatas menunjukkan perkembangan realisasi investasi dalam negeri yang ada Indonesia berdasarkan pulau terbesar pada periode 2018-2022. Perkembangan investasi dalam negeri tersebut berfluktuasi dan cenderung menunjukkan tren yang positif. Akan tetapi Terlihat bahwa pada setiap tahunnya cenderung meningkat investasi di pulau jawa. Sementara di pulau lainnya yakni Nusa Tenggara dan pulau kalimantan terjadi penurunan ditahun 2020 yang diakibatkan oleh pembatasan sosial Covid-19 dan Pulau sementara juga mengalami penurunan di tahun 2021. Kemudian investasi pada Pulau Papua dan Maluku menjadi yang terendah diantara pulau-pulau yang lainnya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ria Rananta Saragi & Sihombing (2024) yakni pengaruh UMP, Investasi dan PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia menemukan investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Penurunan investasi sebesar satu poin persentase menyebabkan berkurangnya 4.752 ribu pekerjaan di Indonesia (Ali et al., 2020). Dalam kondisi konstan (ceteris paribus), tingkat investasi modal yang lebih tinggi berkorelasi dengan peningkatan permintaan tenaga kerja.

Total Investasi Tahun 2022 (dalam triliun rupiah)

Provinsi	PMDN	PMA
Dki Jakarta	89,2	53,7
Jawa Barat	80,8	93,8
Jawa Tengah	25,0	33,9
Di Yogyakarta	2,3	1,6
Jawa Timur	65,4	45,0
Banten	31,3	48,9

Tabel 1.1 Total Investasi Tahun 2022

Sumber : Kementerian Investasi (Data diolah)

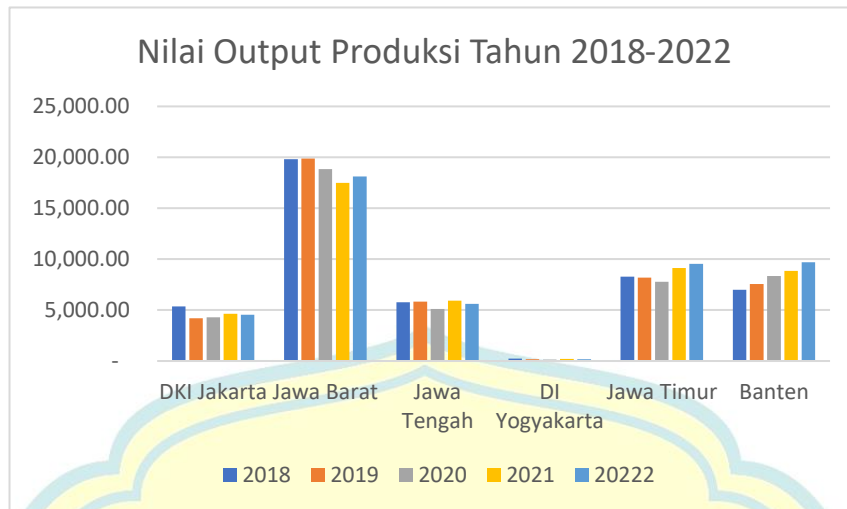
Menurut data yang dilaporkan oleh Kementerian Investasi pada periode 2022 menyatakan lokasi realisasi investasi terbesar yakni Jawa

Barat sebesar Rp174,6 Triliun. Disusul DKI Jakarta sebesar Rp143,0 T. Selain itu provinsi lain yang ada di Pulau Jawa didominasi penanaman modal dalam negeri yakni Jakarta, Yogyakarta dan Jawa Timur meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa investasi asing juga banyak yang tertarik

Penggunaan sumber daya keuangan untuk memperoleh aset modal dan peralatan produksi merupakan investasi, yang bertujuan untuk memodernisasi infrastruktur yang ada atau memperluas kapasitas produksi. Dengan demikian, investasi merupakan usaha ekonomi untuk memperluas kemampuan produksi yang menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi kemudian akan diikuti dengan pertumbuhan kesempatan kerja (Hidayat, 2017).

Proses Pembangunan biasanya terlihat dari proses industrialiasi. Penelitian yang dilakukan oleh dumairy 1996 meyakini bahwa sektor yang terdepan dari semua sektor-sektor adalah sektor industry (Rochmani et al., 2016). Akibatnya, tersedianya lapangan kerja dapat menyusul angka Angkatan kerja yang terus bertambah.

Faktor berikutnya dalam penelitian ini adalah nilai output produksi Sektor industry mempunyai beragam variasi produk sehingga memicu ketertarikan untuk produk- produk industri dapat lebih bermanfaat dan mampu memproduksi nilai ekonomi yang lebih besar dalam outputnya dibandingkan dengan kegiatan sectoral lainnya. Penambahan nilai output yang dihasilkan dari proses produksi akan tercipta lapangan pekerjaan. Nilai output merupakan sebuah proses penciptaan produk dan layanan melalui suatu produksi. Apabila nilai output bertambah maka berimbas pada proses industrialisasi. Dimana semakin tinggi nilai output yang dihasilkan akan meningkatkan keuntungan bagi industry tersebut yang mendorong untuk melakukan ekspansi usaha.



Gambar 1. 5 Nilai Output Produksi Tahun 2018-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Berdasarkan gambar diatas jumlah Nilai Output bersifat fluktuatif. Pada periode 2018-2022. Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah yang terbesar diantara provinsi yang lainnya. Oleh karena itu Semakin besar aktivitas produksi maka jumlah output produksi yang dihasilkan semakin banyak sehingga bisa melakukan ekspansi usaha.

Pada penelitian oleh Eka tahun 2012 menyatakan nilai produksi terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri mebel di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang memiliki pengaruh kearah positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. (Eka et al., 2012). Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Dame (2024) mengungkapkan bahwa meskipun nilai produksi menunjukkan korelasi yang sejalan terhadap terserapnya tenaga kerja akan tetapi tidak menunjukkan signifikansi dalam perhitungan statistik.

berdasarkan masalah yang telah diuraikan faktor-faktor tertentu telah diidentifikasi sebagai pengaruh potensial terhadap penyerapan tenaga kerja. kemudian dijadikan bahan yang akan diteliti. Faktor-faktor tersebut yaitu upah minimum provinsi, investasi dalam negeri dan nilai output produksi. Penelitian sebelumnya yang meneliti faktor penentu ketenagakerjaan telah menghasilkan hasil yang bervariasi dan menunjukan perbedaan. Oleh karena itu, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian

yang berjudul “Pengaruh upah minimum provinsi, Penanaman Modal dalam negeri dan nilai output produksi sektor industri besar dan sedang terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri di Pulau Jawa tahun 2012-2022.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Sesuai dengan fenomena pada penelitian sebelumnya, pertanyaan penelitian pada penelitian ini adalah

- a. Apakah terdapat pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja?
- b. Apakah terdapat pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja?
- c. Apakah terdapat pengaruh Nilai Output Produksi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja?
- d. Apakah terdapat Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Nilai Output Produksi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja secara simultan?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Apakah terdapat pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja?
- b. Untuk mengetahui Apakah terdapat pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja?
- c. Untuk mengetahui Apakah terdapat pengaruh Nilai Output Produksi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja?
- d. Untuk mengetahui Apakah terdapat Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Nilai Output Produksi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja secara simultan?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil atau temuan dari penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan dan pengetahuan bagi pembaca khususnya yang berhubungan dengan pengaruh UMP, PMDN dan Nilai Output Produksi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.

1.4.2 Manfaat praktis

a. Bagi pembaca

Penelitian ini dapat menjadi informasi bagi pembaca tentang faktor-faktor yang akan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada sektor industri khususnya di Pulau Jawa.

b. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti terutama dalam ketenagakerjaan dan aspek-aspek yang mampu membawa pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.